

Forum Freedom 22, 17 Oktober 2005

Tema: NGO & Demokrasi

Nara sumber : Trisno S. Sutanto

Petikannya:

Bagaimana kaum liberal Indonesia mengkaji berbagai masalah nyata yang ada di tengah kita? Freedom Institute bekerja sama dengan radio 68H sajikan Forum Freedom..

Hamid Basyaib

Selamat pagi saudara. Anda berjumpa lagi dalam Forum Freedom bersama saya Hamid Basyaib. Tamu saya kali ini sahabat saya Trisno Sutanto. Pagi Tris..

Trisno Sutanto

Selamat pagi.

HB

Anda kelihatannya segar sekali. Mudah-mudahan jawaban Anda pun segar. Di sini Anda akan ditanya persoalan yang menyangkut organisasi non-pemerintah. Dasarnya begini: salah satu pilar demokrasi adalah civil society, yang diterjemahkan menjadi masyarakat madani. Dalam bentuk organisasionalnya dia berupa organisasi-organisasi non-pemerintah. Karena biasanya organisasi semacam itu adalah pemerintah. Kali ini bukan. Bukan dipilih oleh rakyat, enggak punya anggaran dari negara, dst. Saya kira sejarahnya ini di negara maju. Di Eropa, mungkin sudah seratusan tahun. Di Indonesia sudah dari akhir tahun 50-an, dengan adanya PKBI (Persatuan Keluarga Berencana Indonesia) yang berdiri pada 1958. Jadi itu cikal bakal organisasi non-pemerintah di Indonesia. Lalu tahun 70an berkembang LP3S dsb.

Ungkapan yang lebih populer belakangan ini adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Kalau organisasi pemerintah atau ornop itu tetap mengacu pada pemerintah. Saya kira kebijakan orang untuk lebih menekankan nama LSM itu serta merta ingin menegaskan perbedaan atau pembedaannya dari pemerintah.

Tapi yang penting bukan itu. Itu soal istilah saja. Ada LSM, ornop atau dalam bahasa Inggris disebut Non Governmental Organization (NGO). Kita boleh pakai istilah macam-macam. Tapi pokok perbincangan kita ini tentang maksud atau fungsi ornop dalam sebuah negara.

Saudara, saya perlu informasikan juga bahwa saudara Trisno Sutanto ini adalah seorang aktifis LSM yang sudah berkecimpung selama belasan tahun. Belakangan dia aktif di LSM yang menangani secara spesifik isu-isu keagamaan, misalnya di Madia (Masyarakat Dialog Agama) sebagai direktur program dan di International Conference on Religion and Peace (ICRP). Jadi Trisno ini banyak sekali aktif di ornop yang bergerak di bidang agama. Tapi saya kira Trisno pun tahu kerangka besar dari organisasi non-pemerintah ini. Jadi apa sih peran dan fungsi ornop ini dalam sebuah negara?

TS

Ada beberapa catatan historis yang ingin saya kemukakan sebagai pengantar untuk memasuki diskusi ini. Kalau menurut saya, tradisi NGO atau ornop itu paling kuat di Amerika. Itu direkam dengan sangat bagus oleh Alexis de Tocqueville dengan bukunya Democracy in America. Buku itu menggambarkan dengan sangat bagus perkembangan civil society di Amerika. Buku itu pun berpengaruh besar pada pemikiran-pemikiran berikutnya. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut catatan histories lainnya di Indonesia, saya kira jejak-jejak ornop bisa ditarik sampai sebelum PKBI. Misalnya peranan reading room yang berkembang pada tahun sekitar 1910-1920. Itu kelompok-kelompok baca. Orang-orang seperti Tan Malaka, Sutan Sjahrir, Hatta banyak menimba dari situ.

Itu juga bangkitnya pers pribumi awal. Dan itu berkembang di sepanjang Jawa. Khususnya di tempat-tempat yang dulu namanya ballroom. Ballroom itu didirikan oleh Belanda. Ada semacam perpustakaan di situ. Lalu terbentuklah kelompok-kelompok pembaca. Dan dari sinilah sesungguhnya lahir pemikiran-pemikiran yang segar mengenai kondisi sosial, politik, dst.

Tapi yang paling sering kita dapatkan dalam konteks sekarang tentu saja peranan LSM khususnya ketika berlawanan dengan negara. Itu salah satu ciri paling kuat di Indonesia. Kalau kita kembali misalnya pada tahun 70-80, khususnya pada tahun 90, LSM ini ibaratnya garda terdepan yang melawan negara. Karena seperti yang Anda tekankan di awal tentang non-pemerintah atau swadaya masyarakat itu (adalah sebuah) istilah yang mau dikemukakan sebagai sebuah resistensi atau perlawanan terhadap negara yang memang intrusive sekali. Ini berkembang di hampir semua aspek. Lalu akhirnya mewarnai sekali ideologi dan juga pola gerakan LSM. Sehingga kalau kita lihat hampir di seluruh LSM, kalau kita amati sampai tahun 90-an, seluruh LSM ibaratnya kalau bukan anti secara frontal dengan pemerintah, atau paling tidak menjadi suara-suara kritis.

Di sinilah peranan misalnya kelompok-kelompok diskusi mahasiswa yang mulai berkembang sangat pesat setelah pertengahan tahun 70-an, setelah normalisasi kampus, yang membuat mereka mengambil juga forum-forum keagamaan. Dalam Islam misalnya di Masjid Salman yang sangat terkenal dengan pusat penggodokan (pengkaderan mahasiswa Islam "radikal"). Saya masih ingat di tahun 80an itu selalu datang dari kelompok diskusi ini dengan bacaan-bacaan yang kritis mengenai negara, masyarakat. Karena pada waktu itu kita merasakan sekali bagaimana sulitnya mencari bacaan-bacaan kritis. Bahkan untuk punya bukunya Pramudya saja sampai harus di penjara.

HB

Jadi bisa disimpulkan bahwa faktor tetap atau konstanta dari keberadaan LSM itu adalah penghadapannya dengan kekuatan negara. Ini bukan hanya berlaku bagi LSM yang bergerak di bidang hak asasi manusia. Pada dasarnya semua?

TS

Hampir semua.

HB

Juga agama dan kesenian?

TS

Ya. Karena memang LSM atau NGO di awal-awal, termasuk saya kira di Amerika, berawal dari semacam asosiasi-asosiasi bebas. Lalu mereka mulai mendirikan semacam pertemuan berkala, membuat dokumentasi, dst. Yang akhirnya menjadi semacam penjaga dari warisan-warisan yang selama ini disukai. Ini (LSM) pada akhirnya menjadi, kalau di dalam konstelasi politik, garis tengah yang membedakan pemerintah dan masyarakat. Kira-kira berada di tengah. Dan di Indonesia khususnya atau di negara-negara berkembang umumnya, LSM lalu menjadi perlawanan ketika negara begitu intrusive, mau mengatur seluruh aspek hidup masyarakat. Kepengapan yang dirasakan di dalam sifat intrusive negara (kemudian) mau ditandingi dengan asosiasi-asosiasi bebas ini. Dan saya kira ini ideologi yang bertahan sampai sekarang ketika situasinya sudah sama sekali berbeda. Bahkan metodenya.

HB

Jadi dia semacam perantara antara masyarakat luas dengan negara. Jadi dia artikulator kepentingan masyarakat. Dialah yang menyuarakannya. Mungkin karena jarak antara masyarakat dan negara sangat jauh?

TS

Ya. Dan juga sifat negara yang mau mengatur segala-galanya, totalitarian. Di dalam proses inilah LSM tumbuh. Dan biasanya dikenal dengan advokasi kepada masyarakat. Jadi misalnya petani tidak punya bargaining power yang cukup terhadap kebijakan negara. Karena itu mereka membentuk kelompok-kelompok atau himpunan-himpunan tani untuk menjadi semacam artikulator mereka.

HB

Barangkali ciri itu yang membuat orang melihat kaitannya dengan demokrasi?

TS

Betul.

HB

Artinya, bisa enggak dibilang bahwa tingkat demokrasi suatu negara itu bisa diukur dari banyaknya atau aktifnya LSM-LSM yang ada di negara itu?

TS

Saya kira bukan dalam arti kuantitatif saja. Tetapi lebih juga pada penanaman nilai-nilainya. Karena di dalam asosiasi bebas inilah orang-orang belajar seperti yang diistilahkan oleh ahli-ahli ilmu sosial sebagai basic trust antar warga. Dan ini merupakan komponen utama dalam sistem demokrasi. Apalagi untuk masyarakat yang sangat majemuk. Ambil contoh sebagai pengalaman saja misalnya LSM di mana saya aktif sekarang: Madia. Selama ini pemerintah juga punya forum-forum dialog antar agama. Lalu bagaimana membedakannya? Pembedaannya adalah kalau dari pemerintah biasanya dialognya bersifat formal. Karena itu selalu yang diundangnya tokoh-tokoh agama seperti dari MUI, Muhammadiyah, KWI, dsb. Lalu biasanya mereka membicarakan masalah-masalah yang didesain oleh pemerintah. Bagaimana misalnya KB ditinjau dari sudut pandang agama-agama. Jadi agendanya sebagian ditetapkan pemerintah.

Nah LSM justru tumbuh sebagai perlawanan terhadap itu. Alternatif yang lain ketika kelompok-kelompok sosial ini mencoba mendiskusikan agenda yang mereka rasakan sama-sama. Misalnya persoalan-persoalan keagamaan yang real yang dihadapi masyarakat. Mengapa misalnya ada kecurigaan antar satu kelompok dengan kelompok lain. Di LSM inilah mereka mulai mendiskusikannya secara bebas dan terbuka karena tidak ada ikatan formal. Karena itu yang menarik diamati misalnya untuk kasus LSM keagamaan, sebagian besar mereka yang aktif di situ adalah bukan tokoh-tokoh formal. Tanpa ada beban mereka bisa bergerak, mereka bisa mendiskusikan soal-soal yang lebih kongkrit yang dihadapi umat.

HB

Bukan masalah umat sebagaimana yang dirumuskan oleh pemerintah dan kemudian ditanggapi oleh tokoh agama?

TS

Betul.

HB

Misalnya apa Tris?

TS

Yang sering didiskusikan misalnya tentang isu kristenisasi. Itu sebagai contoh di LSM antar agama. Kalau kristenisasi ini dibaca oleh tokoh-tokoh formal, maka biasanya kembali pada rujukan ayat-ayat. Ini doktrinnya begini. Ayatnya begini, dsb. Tetapi kalau dibicarakan di lingkungan LSM biasanya berbicaranya sangat sederhana. Sesuatu yang sifatnya sehari-hari. Saya melihat bahwa ini terjadi begini. Pengalaman saya di sini begini. Tetapi dengan membicarakan bersama-sama maka sesungguhnya mulai dibangun yang basic trust tadi.

(Iklan)

HB

Tris, Anda tadi ngomong tentang kaitan antara LSM dan demokrasi. Anda setuju enggak kalau ada yang mengatakan bahwa LSM itu perlu kuat dan mandiri?

TS

Saya kira memang seharusnya setuju kalau kita kembali pada istilah yang mau dipakai: swadaya. Itu sudah menunjukkan kemandirian dari LSM itu. Seberapa kuat dan seberapa mandiri tentu saja tergantung pada masing-masing LSM. Tetapi yang menyedihkan dalam pengalaman saya selama ini di LSM adalah bahwa LSM kita memang masih kurang mandiri.

HB

Dari segi apa?

TS

Khususnya dari segi pengelolaan pembiayaan atau dana. Karena harus diakui dalam banyak hal LSM ini sering dituduh sekadar perpanjangan tangan dari funding agency. Dan memang umumnya dari asing. Memang dana-dana dari asing itu sangat besar dan harus diakui (bahwa dana-dana dari asing itu) banyak sekali menyerap seluruh kegiatan LSM. Dan kita masih kurang. Saya pernah berdiskusi panjang dengan seorang teman aktifis LSM dari India. Di India situasi LSM-nya sama sekali lain. Sumber-sumber lokal bisa mereka gali..

HB

Penyandang dananya orang India sendiri?

TS

Betul. Bahkan mereka berusaha menggandeng kelompok bisnis atau membangun bisnis sendiri dengan masyarakat. Kalau di sini mungkin agak sedikit diremehkan. Jadi mengusahakan sebuah sumber dana yang betul-betul swadaya.

HB

Itu kebetulan LSM-LSM yang bergerak di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil. Lalu bagaimana LSM yang bergerak di bidang lain, misalnya agama?

TS

Menurut saya bisa saja.

HB

Prakteknya sudah terjadi?

TS

Saya belum melihat di Indonesia. Yang saya temukan di Indonesia sebagian besar LSM masih sangat tergantung pada funding agency asing.

HB

80 atau 90 persen?

TS

Wah, saya enggak tahu. Kita harus tanya teman kita Saiful.

HB

Terus?

TS

Nah ini kadang membuat LSM lemah.

HB

Lemah dari segi apa? Lemah dari kritik atau lemah dari serangan balik pemerintah?

TS

Serangan juga ya. Dan paling sering kita dengar adalah serangan dari kelompok pemerintah maupun kelompok-kelompok yang anti LSM.

HB

Selalu bilang, "Alah, itu uangnya dari orang Amerika"?

TS

Ya. Kita pernah denger omongan pemerintah: "LSM menjual bangsa dan negara". Jadi ini membuat posisi LSM lemah. Memang ini kritik diri.

HB

Kritik pemerintah kan enggak valid juga. Artinya uang pemerintah sendiri banyak dari pinjaman asing?

TS

Justru itu. Kalau kasus di Amerika malah menarik. Karena LSM itu dibantu oleh pemerintah. Toh uangnya pemerintah kan uangnya masyarakat juga melalui pajak.

HB

Itu tidak mengurangi independensi mereka?

TS



Menurut saya tidak. Karena di Amerika itu ada sistem semacam pemotongan atau pemutihan pajak. Jadi bagian yang sudah disumbangkan itu kemudian dipotong, tidak lagi kena pajak, tax free. Lalu dikelola oleh lembaga-lembaga foundation yang cukup berpengaruh dan kuat untuk independen dari pemerintah, dan mereka yang membagikan ke dalam lingkup LSM. Saya kira itu bisa sebagai model. Tapi saya (agak ragu) kalau melihat ekonomi Indonesia sekarang. Itu persoalan pertama.

Persoalan kedua yang lebih penting daripada urusan pendanaan adalah persoalan antara konstituen LSM dan LSMnya sendiri. Kadang-kadang terpisah, ada jarak. Karena kalau misalnya LSM itu dananya dikelola dari konstituennya, seharusnya konstituen itu bisa menuntut pertanggungjawaban LSM.

HB

Dari segi apa? Pembelanjaan dana misalnya?

TS

Dari segi transparansi, pembelanjaan dana, efektifitas program, kebijakan-kebijakan yang diambil, dsb.

HB

(kata mereka) Apakah ini sesuai dengan apa yang paling dibutuhkan masyarakat.

TS

Apakah memang itu artikulator yang sesungguhnya atau ini artikulator untuk kepentingan-kepentingan pihak lain...

HB

Yang justru berseberangan dengan kepentingan masyarakat itu sendiri.

TS

Betul. Nah kita itu hampir tidak punya audit dari masyarakat terhadap LSM-nya sendiri. Auditnya malah dari foreign agency. Ini misalnya Ford Foundation mencurahkan dana maka Ford menyediakan tenaga audit untuk melihat itu (aliran dana itu?), tetapi tidak melihat masyarakat mengaudit LSM yang konon direpresentasikannya. Ini salah satu yang membuat LSM kurang memiliki kemandirian dan akhirnya bargaining position dengan pemerintahnya kurang kuat. Dalam konteks ini akhirnya terjadi ketergantungan dana kepada pihak asing. Saya tidak mau menuduh seluruh LSM begitu. Ini varian-varianya banyak sekali.

HB

Ya, kita sedang membicarakan fenomena. Kita tidak membicarakan salah satu LSM tertentu tapi kita ingin mengkaji LSM lebih akademis ya?

TS

Ya. Nah kalau kita melihat dari sudut pandang itu ada hal lain yang seringkali membuat orang antipati pada LSM, yaitu seringkali LSM jadi rebutan proyek. Jadi misalnya ada dana dari Ford Foundation atau US Embassy lalu kemudian semua LSM itu berebut di situ. Kasus pemilu itu contoh yang paling bagus. Bagaimana perebutan sumber-sumber daya itu yang kadang-kadang kita harus mempertanyakan ulang: apakah kita harus seluruhnya tergantung? Ini menurut saya salah satu akar kenapa (agak) sulitnya membangun platform bersama.

HB

Kita masuk soal platform. Kalau begitu Anda setuju bahwa LSM-LSM yang bersebaran itu mestinya menyatu. Enggak perlu menyatu dalam arti struktural. Nah Anda setuju bahwa harus ada platform bersama untuk meningkatkan daya efektifitas dan independensinya dsb?

TS

Bukan hanya setuju tapi saya kira hukumnya wajib. Apalagi dalam konteks perubahan masyarakat yang sekarang kita hadapi.

HB

Mengapa sedemikian urgen?

TS

Karena ini basis untuk melakukan demokrasi lebih luas lagi. Ini semacam pijakan. Di sinilah kita berpijak bersama-sama. Tanpa ada kekuatan bersama seperti itu di mana ada nilai-nilai yang kita pijak bersama, itu akan menjadikan bargaining power masyarakat untuk secara kritis mengawasi pemerintah menjadi lemah.

HB

Anda sepertinya sedang meratap. Apakah anda melihat kerjasama yang ideal itu belum terwujud? Anda melihat LSM-LSM bergerak sendiri-sendiri?

TS

Saya melihatnya begitu. Dalam banyak hal saya masih melihat bahwa perserakan itu begitu besar. Bahkan bukan hanya perserakan, tapi perbenturan. Kadang saling sikut dan saling tikam-menikam.

HB

Kedengarannya buruk sekali?

TS

Misalnya kita sering mendengar (omongan orang lain), "itu tuh LSM plat merah, LSM itu corongnya pemerintah, LSM itu sudah dibayari oleh businessman-businessman tertentu." yang membuat ini semua menjadikan (keanehan?). Ketika ada LSM yang dituduh plat merah itu kritis kepada pemerintah, lalu mereka dikatakan pura-pura, sedang bersandiwara, dst. Belum lagi mengatakan LSM kota dan desa. Jakarta dan non-Jakarta.

HB

Atau dipisahkan oleh garis ideologis. Mungkin agama, politik, ekonomi dst. Misalnya, "Wah, itu kelihatannya kelompok sosialis, ini kapitalis, dst.."

TS

Belum lagi ada persoalan lain. Misalnya yang berperan garis primordial.

HB

Garis primordial dalam arti etnis?

TS

Etnis dan agama. Agama saya lihat paling kuat.

HB

Itu artinya ada satu isu yang mestinya jadi isu bersama dan ada sejumlah LSM yang berafiliasi dengan agama tertentu atau organisasi keagamaan tertentu tidak ikut serta. Misalnya isu HAM. Biasanya kelompok-kelompok agama kurang peduli?

TS

Betul. Wacana itu belum begitu kuat didengar di dalam kelompok-kelompok keagamaan. Pengalaman saya menunjukkan hal itu.

HB

Itu terjadi di semua agama?

TS

Mungkin. Memang ini harus diakui. Saya tidak mau mengkomplikasi bahwa ada debat-debat teologis dibalik ini semua. Tetapi menurut saya masih sangat kurang. Apalagi kalau sudah menyentuh persoalan-persoalan yang sebutlah

sangat krusial. Kadang-kadang ada semacam kesan bahwa kalau ada isu-isu tertentu itu urusannya yang sana, bukan urusan kami. Ini baru kesan awal. Saya belum berani mengatakan bahwa ini sudah scientifically proven.

HB

Misalnya isu lingkungan hidup?

TS

Itu hanya Walhi. KWI dan sebagainya hampir tidak peduli.

HB

Padahal isu lingkungan betul-betul isu bersama?

TS

Itu isu bersama. Sesuatu yang sekarang kita hadapi sama-sama.

HB

Jangan-jangan ada kecurigaan juga?

TS

Bisa. Atau tidak ada kontak-kontak tadi dan tidak ada forum bersama. Memang ada usaha untuk itu. Misalnya saya ingat LP3S pernah mengadakan sebuah forum pertemuan nasional LSM. Forum itu membuat kajian dan juga usaha mempertemukan ideologi dan isu-isu bersama.

HB

Tapi gagal?

TS

(Justru) muncullah kecurigaan-kecurigaan yang menghambat ini semua. Dan istilah yang paling saya dengar, "Ah, inikan agenda Jakarta, bukan agenda kami di daerah". Akhirnya ini menjadi problem antar LSM. Kecurigaan-kecurigaan ini jadi masalah.

HB

Kalau begitu situasinya agak suram dan cukup rumit. (pendapat ini justru) muncul dari orang seperti Anda yang sudah lama gulungkuming atau bergelut di kancah LSM. Ini harus saya katakan sebagai kabar buruk. Saya ingin mendengar kabar baiknya. Strategi apa yang Anda usulkan untuk membangun aliansi bersama di antara LSM-LSM yang ada? Mungkin tidak perlu 100 persen. Tapi kalau ada persentase yang tinggi di kalangan LSM untuk bersatu dalam arti memperjuangkan platform bersama. Bagaimana menurut Anda?

TS

Ada beberapa pengamatan saya yang juga sudah diamati oleh teman-teman yang aktif di LSM. Dan menurut saya sudah ada kabar baiknya: ada kesadaran di kalangan aktifis yang sudah cukup asam garamnya. Mereka sudah melihat bahwa kadang-kadang misalnya ideologi yang melulu anti pemerintah itu harus mulai dirubah strategi. Karena situasi sekarang berbeda sekali.

HB

Mereka bergerak seperti di masa orde baru ya?

TS

Ya, seakan-akan kalau di orde baru kita punya musuh bersama yang harus kita lawan. Tapi sekarang kan sudah berubah.

HB

Tidak berarti semua (tidak) harus setuju pada pemerintah?

TS

Betul. Tetapi sikap kritis itu tidak dalam pengertian anti. Artinya aliansi-aliansi strategis bisa dibangun dengan unsur-unsur pemerintah maupun dengan kelompok-kelompok bisnis. Yang terakhir ini (gagasan tentang aliansi dengan kelompok bisnis ini) pernah didiskusikan dengan cukup panjang dengan teman-teman seperti Faisal Basri. Jadi memperluas aliansi-aliansi ini. Dan saya kira di sini akan ada titik temu. Mungkin tidak 100 persen seperti yang Anda sebutkan tadi. Tapi ini bisa menjadi milestones untuk melangkah ke depan.

HB

Baik Tris. Itu yang saya suka dari Anda: serangkaian pesimisme sudah Anda muntahkan tetapi masih tersisa optimisme. Karena tanpa itu (optimisme) kita takkan hidup. Demikian forum freedom. Terima kasih.